

Implementasi Komunikasi Persuasif Aparat Kecamatan dalam Kasus Sengketa Lahan PT. Kalimantan Hamparan Sawit di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas

Hokbie¹, Srie Rosmilawati²

^{1,2}Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia
Email : hokbie79bb@gmail.com¹, srie.rosmilawati@umpr.ac.id²

Article History:

Received: 04 April 2026

Revised: 18 Mei 2026

Accepted: 01 Juni 2026

Keywords: Implementasi, Komunikasi Persuasif, Aparat Kecamatan, Sengketa Lahan, Kabupaten Gunung Mas.

Abstract: Penelitian ini mengkaji implementasi komunikasi persuasif oleh aparat Kecamatan Manuhing dalam penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan PT. Kalimantan Hamparan Sawit (KHS) dan masyarakat Desa Tumbang Jalemu. Sengketa ini berakar dari perbedaan pemahaman terkait penguasaan lahan, dimana masyarakat mengklaim hak atas lahan tersebut berdasarkan pengelolaan turun-temurun, sementara perusahaan mengandalkan dokumen legal resmi yang sah menurut aturan negara. Keberhasilan penyelesaian konflik ini bergantung pada efektivitas komunikasi yang digunakan oleh pihak yang terlibat, termasuk aparat kecamatan sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi komunikasi persuasif oleh aparat Kecamatan Manuhing dalam kasus ini dapat dikategorikan Cukup Berhasil, terutama efektif dalam meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas sosial, namun belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan sengketa lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada dua orang aparat Kecamatan Manuhing, satu perwakilan PT KHS, serta dua orang masyarakat Desa Tumbang Jalemu yang terdampak langsung oleh sengketa lahan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus utama analisis ini adalah untuk memahami praktik komunikasi persuasif yang diterapkan aparat kecamatan, merujuk pada tujuh aspek komunikasi persuasif yang meliputi pemaknaan awal, verifikasi informasi, penyampaian pesan, dialog, negosiasi, penguatan kesepakatan, serta evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat Kecamatan Manuhing berhasil menjaga kestabilan sosial dengan melakukan komunikasi yang lebih menenangkan dan netral, serta memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan

pendapatnya. Meskipun demikian, kendala utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan dalam hal data dan klaim antara masyarakat dan perusahaan, serta ketidakmampuan warga untuk menyampaikan argumentasi secara sistematis dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Meski demikian, komunikasi persuasif oleh aparat kecamatan terbukti efektif dalam meredakan ketegangan, namun belum mampu menyelesaikan masalah substantif terkait legalitas dan kepemilikan lahan. Dari penelitian ini, disarankan agar aparat kecamatan terus mengembangkan metode komunikasi yang lebih mendalam, terutama dalam hal penyampaian informasi yang lebih jelas mengenai sejarah penguasaan lahan, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menyusun argumen yang lebih terstruktur. Evaluasi berkelanjutan terhadap proses komunikasi juga penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di masa depan.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah telah membawa perubahan sosial yang luas bagi masyarakat di sekitarnya (Kementerian Pertanian RI, 2016). Kehadiran perusahaan skala besar sering kali diikuti oleh berbagai bentuk interaksi antara pihak perusahaan, masyarakat lokal, dan pemerintah setempat. Dalam praktiknya, interaksi tersebut tidak selalu berjalan selaras dengan harapan masyarakat, terutama ketika berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan hak masyarakat adat. Sengketa lahan menjadi salah satu persoalan yang kerap muncul akibat perbedaan pemahaman, kepentingan, serta komunikasi yang tidak berjalan secara efektif antara para pihak yang terlibat (Wilya, 2024). Kondisi ini menuntut keterlibatan pemerintah daerah sebagai mediator untuk meredam konflik dan membangun kesepahaman yang dapat diterima oleh semua pihak.

PT Kalimantan Hampanan Sawit (KHS) merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas lahan mencapai kurang lebih 12.000 hektar. Perusahaan ini berada di bawah naungan grup usaha Astra Agro Lestari dan Permata Group yang bergerak dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Aktivitas operasional perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah Perkebunan (Frengky & Situmorang, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, PT KHS menghadapi persoalan sengketa lahan dengan masyarakat lokal, khususnya di Desa Tumbang Jalemu, yang berkaitan dengan tuntutan klaim pengembalian hak ulayat dan kesepakatan plasma yang masih belum sepenuhnya dijanjikan kepada warga dan hanya sebatas kompensasi.

Berdasarkan informasi pada *lawan web Kaltengonline.com* pada 2023, sengketa yang terjadi antara masyarakat Desa Tumbang Jalemu dan PT KHS berakar pada ketidaksesuaian antara janji perusahaan dan realisasi yang diterima oleh warga. Masyarakat menyampaikan bahwa program plasma yang dijanjikan tidak pernah disalurkan sebagaimana kesepakatan awal. Sebagai gantinya, warga hanya menerima kompensasi yang diberikan setiap tiga bulan sekali. Kondisi

tersebut menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat, karena nilai kompensasi dinilai tidak sebanding dengan pemanfaatan lahan yang telah digunakan perusahaan untuk kegiatan perkebunan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa lahan, aparat Kecamatan Manuhing memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan Perusahaan (Nabilla, 2022). Kecamatan Manuhing merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gunung Mas dan mencakup sejumlah desa, termasuk wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas Perkebunan (Diskominfosantik Kab. Gunung Mas, 2024). Aparat kecamatan dituntut untuk menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan mediasi agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Proses komunikasi yang dilakukan aparat kecamatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mampu menyentuh aspek psikologis dan sosial masyarakat yang terlibat dalam sengketa.

Untuk mengatasi kompleksitas konflik agraria seperti sengketa lahan ini, pendekatan komunikasi persuasif menjadi instrumen yang krusial. Komunikasi persuasif, sebagai sebuah disiplin ilmu, mengkaji bagaimana pesan dirancang dan disampaikan untuk mempengaruhi sikap, opini, dan perilaku audiens secara sukarela (Zulfiana, 2020; Musawir, 2026). Dalam konteks pemerintahan dan penyelesaian konflik, komunikasi persuasif tidak bertujuan untuk memaksakan kehendak, melainkan untuk membuka ruang dialog, membangun pemahaman bersama, meredakan ketegangan, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang didasarkan pada kesadaran dan penerimaan semua pihak. Aparat pemerintah berupaya meyakinkan masyarakat dan pihak perusahaan agar bersedia membuka ruang komunikasi, menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta mencari solusi yang dapat diterima secara bersama. Keberhasilan komunikasi persuasif sangat dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator, kejelasan pesan, daya Tarik emosional, dan penggunaan argumen rasional (Agustina, et. al, 2024; Aldi, et. Al, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi komunikasi persuasif oleh aparat Kecamatan Manuhing dalam kasus sengketa lahan PT. Kalimantan Hamparan Sawit menjadi relevan untuk memahami efektivitas peran mereka.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh aparat Kecamatan Manuhing dalam upaya menyelesaikan kasus sengketa lahan antara masyarakat dan PT Kalimantan Hamparan Sawit. Analisis ini difokuskan pada cara aparat kecamatan menyusun pesan, membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat dan pihak perusahaan, serta mengelola proses dialog dalam situasi konflik yang sarat dengan ketegangan sosial, dengan merujuk pada indikator-indikator kunci komunikasi persuasif. Penelitian ini memiliki urgensi karena sengketa lahan yang berlarut dapat memicu ketidakstabilan sosial di tingkat lokal serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik komunikasi persuasif dalam konteks pemerintahan kecamatan sebagai mediator konflik agraria. Manfaat penelitian ini tidak hanya bersifat akademik dalam memperkaya kajian Ilmu Komunikasi, khususnya komunikasi persuasif dan komunikasi pemerintahan, tetapi juga bersifat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi aparat pemerintah daerah dalam merancang pendekatan komunikasi yang lebih efektif ketika menghadapi konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di wilayah pedesaan.

KAJIAN TEORI

Proses komunikasi menjadi unsur utama dalam upaya penyelesaian konflik yang muncul di tengah masyarakat, terutama ketika konflik tersebut melibatkan kepentingan yang saling bertentangan (Afrihadi, 2025). Salah satu pendekatan yang kerap digunakan adalah komunikasi

persuasif, yakni cara berkomunikasi yang diarahkan untuk membuka ruang dialog, perundingan, dan musyawarah guna menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak (Hakim, et. al, 2023). Melalui pendekatan ini, pihak-pihak yang terlibat konflik didorong untuk saling menyampaikan pandangan, kepentingan, serta harapan mereka secara terbuka, baik melalui pertemuan langsung maupun dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Proses tersebut tidak hanya bertujuan meredakan ketegangan, tetapi juga membangun kesediaan bersama untuk mencari solusi yang tidak bersifat memaksa, sehingga hasil yang dicapai lahir dari kesepakatan dan kesadaran bersama.

Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang dirancang secara sadar dan terstruktur untuk memengaruhi sikap, opini, keyakinan, atau perilaku audiens secara sukarela, tanpa adanya paksaan (Zulfiana, 2020; Musawir, 2026). Dalam proses ini, pesan yang disampaikan tidak diterima secara mentah, melainkan diproses melalui pengalaman, emosi, dan penilaian subjektif penerima pesan. Subjektivitas tersebut memengaruhi cara audiens memahami pesan dan memberikan umpan balik, sehingga komunikasi berlangsung sebagai proses dinamis yang terus bergerak (Musawir, 2026). Pemahaman terhadap kondisi psikologis dan latar belakang audiens menjadi dasar dalam merancang pesan agar dapat diterima secara lebih terbuka, tanpa memunculkan resistensi atau penolakan yang berlebihan.

Dalam konteks penyelesaian konflik, komunikasi persuasif bertujuan untuk membuka ruang dialog, memfasilitasi negosiasi, dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan persuasif juga berkaitan dengan cara sumber pesan membangun kepercayaan, mengelola emosi, serta menyusun argumen yang dapat dipahami secara rasional. Kredibilitas komunikator terbentuk melalui pengalaman, sikap, dan cara menyampaikan pesan, yang kemudian memengaruhi penerimaan audiens (Nurdiantara, Rachman & Maesurah, 2025). Di sisi lain, sentuhan emosional digunakan untuk membangkitkan empati, perhatian, dan kemauan audiens dalam merespons pesan yang disampaikan (Nasichah, Ilmi & Nidaulhaq, 2024). Selain itu, aspek rasional berfungsi untuk membantu audiens memproses informasi secara logis melalui penjelasan yang runtut dan masuk akal (Zaka et.al, 2024). Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam membentuk pesan yang tidak hanya didengar, tetapi juga dipertimbangkan secara mendalam oleh penerima.

Secara sederhana, proses komunikasi persuasif dalam menyelesaikan sengketa antara dua pihak (Hakim, et. al., 2023) adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Proses Komunikasi persuasif dalam menyelesaikan sengketa Antara dua pihak.

Sehingga dalam penelitian kali ini, analisis terhadap proses komunikasi yang dilakukan aparat kecamatan manuhing didasarkan pada tahapan proses komunikasi persuasif sebagaimana dijelaskan pada bagan tersebut.

Selanjutnya, dalam konteks konflik sosial, komunikasi persuasif sering dikaitkan dengan perubahan sikap yang dipengaruhi oleh pengalaman personal dan kondisi sosial di sekitarnya (Rahayu, 2024). Ketika kebutuhan individu tidak terpenuhi, kekecewaan personal dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas. Pola ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pengalaman individu dengan situasi eksternal yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi yang dirancang secara terencana menjadi sarana untuk mengarahkan respons audiens secara bertahap, dengan mempertimbangkan latar sosial, ekonomi, dan psikologis yang melingkupi mereka. Pendekatan ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui persiapan pesan, pemilihan saluran komunikasi, serta penentuan sasaran yang jelas.

Komunikasi Pemerintahan dalam Penyelesaian Konflik

Komunikasi pemerintahan merujuk pada proses penyampaian informasi, gagasan, dan kebijakan dari pemerintah kepada publik, serta sebaliknya, untuk membangun pemahaman, partisipasi, dan akuntabilitas (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas, 2024). Dalam konteks resolusi konflik, komunikasi pemerintahan berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian damai, serta mengkomunikasikan kebijakan dan solusi yang ditawarkan. Aparat kecamatan, sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat lokal, memainkan peran krusial dalam mengelola komunikasi ini. Mereka dituntut untuk mampu menerapkan strategi komunikasi yang efektif, termasuk komunikasi persuasif, untuk meredam ketegangan, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan (Aldi, et. al, 2025).

Konsep Keberhasilan Komunikasi Persuasif dalam penyelesaian konflik

Keberhasilan komunikasi persuasif dalam penyelesaian konflik dapat diukur melalui berbagai pendekatan yang terstruktur, seperti negosiasi, mediasi, fasilitasi, diplomasi, dan konfrontasi. Tujuan utama dari komunikasi persuasif dalam konteks ini adalah untuk mengubah sikap, keyakinan, dan perilaku pihak-pihak yang berkonflik dengan cara mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pihak terkait. Keberhasilan tersebut tidak hanya terfokus pada penyelesaian substansi konflik, tetapi juga pada kemampuan untuk mengelola ketegangan dan menghindari eskalasi lebih lanjut, melalui pendekatan yang bijaksana dan sensitif terhadap aspek budaya, sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. (Nurjanah, 2015).

Adapun Poin-Poin Keberhasilan Komunikasi Persuasif dalam Penyelesaian Konflik Adalah sebagai berikut (Heluka, Erniwati & Halim, 2023):

1. Saluran Komunikasi yang Efektif
Penggunaan pertemuan tatap muka dan platform online seperti media sosial (grup chat) meningkatkan aksesibilitas informasi, memungkinkan semua pihak tetap mendapatkan informasi terbaru, meskipun mereka tidak bisa hadir dalam pertemuan fisik. Ini sangat penting untuk mempertahankan solidaritas dan mendorong partisipasi
2. Keterlibatan dan Partisipasi
Mendorong partisipasi aktif dari semua anggota, termasuk melalui pertemuan wajib dan kegiatan sosialisasi, membantu membangun pemahaman bersama dan memperkuat solidaritas dalam kelompok. Hal ini memastikan proses komunikasi menjadi inklusif dan semua suara didengar
3. Pemecahan Masalah dan Pengelolaan Waktu
Mengatasi masalah dengan cepat dan mengelola waktu dengan efisien merupakan strategi

penting untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul, seperti kesibukan individu atau penggunaan teknologi yang berlebihan. Ini membantu menyelesaikan konflik sebelum eskalasi terjadi

4. Membangun Kepercayaan dan Solidaritas
Evaluasi rutin, kegiatan pembangunan tim, dan diskusi terbuka menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan dukungan timbal balik, yang sangat penting untuk menjaga kolaborasi jangka panjang dan meminimalkan konflik
5. Kemampuan Beradaptasi dalam Komunikasi
Strategi yang diterapkan oleh organisasi menunjukkan keseimbangan antara komunikasi formal (misalnya pertemuan dan instruksi resmi) dan metode informal (misalnya diskusi dan berbagi umpan balik melalui media sosial). Pendekatan yang fleksibel ini memungkinkan interaksi yang efektif dan adaptasi terhadap situasi konflik yang berbeda

Selanjutnya konsep ini digunakan untuk menilai, apakah capaian dari komunikasi persuasif dilakukan aparat Kecamatan Manuhing dapat dikatakan berhasil ataukah belum cukup berhasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam (Roosdina, et. al., 2021). Proses implementasi komunikasi persuasif dalam penyelesaian sengketa lahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat Kecamatan Manuhing sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi antara masyarakat dan perusahaan, wawancara dengan pihak humas PT Kalimantan Hamparan Sawit untuk memperoleh penjelasan mengenai sudut pandang dan strategi komunikasi perusahaan, serta wawancara dengan warga yang terdampak sengketa lahan guna menggali pengalaman dan tanggapan mereka terhadap upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah kecamatan.

Di samping wawancara, penelitian ini juga dilengkapi dengan observasi lapangan untuk melihat secara langsung dinamika interaksi, pola komunikasi, dan situasi sosial yang berkembang selama proses penyelesaian sengketa (Rusman, 2025). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik komunikasi persuasif dalam konteks konflik agraria di wilayah Kecamatan Manuhing.

Penelitian Terdahulu

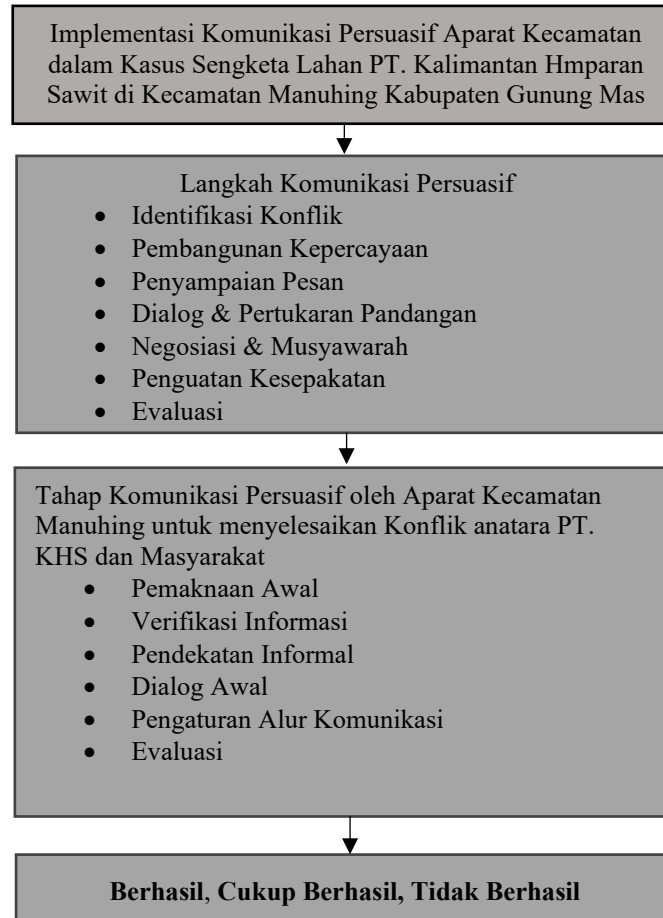
1. Penelitian oleh Rahmat Hidayat dan Susi Evanita (2022) berjudul Strategi Komunikasi Pemerintah Nagari dalam Menangani Konflik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) antar Warga di Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, membahas praktik komunikasi yang dilakukan Pemerintah Nagari Tanjung Barulak dalam menghadapi konflik antarwarga akibat kerusakan fasilitas PDAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang menggambarkan proses penyelesaian konflik melalui komunikasi preventif, sosialisasi aturan PDAM, serta pendekatan persuasif antara Wali Nagari, lembaga adat, ketua pemuda, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh keputusan pipa air secara sepihak, lemahnya pengawasan, serta ketidakbukaan warga dalam penggunaan fasilitas air, sementara upaya penyelesaiannya dilakukan melalui penyampaian sanksi, musyawarah dengan tokoh adat, penggalangan kesepakatan pendanaan bersama, dan komunikasi lanjutan dengan pihak PDAM untuk mengaktifkan kembali pengadaan air bersih di nagari tersebut.
2. Penelitian oleh Stevi Gretlin Madi, Lukas Lebi Daga, dan I Gusti Ayu Rina Pietriani (2022)

berjudul Komunikasi Persuasif Ketua RT dalam Mengatasi Hubungan Disharmonisasi Warga (Studi Kasus di RT028, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang) yang dipublikasikan dalam *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, Volume 2 Nomor 1, April 2022, membahas praktik komunikasi persuasif yang dilakukan Ketua RT028 dalam menangani konflik antar warga melalui pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik dilakukan melalui kompromi dan mediasi dengan tahapan menarik perhatian warga, mendalami konflik, memberi nasihat, melakukan perdamaian, serta menjaga keharmonisan melalui komunikasi lanjutan, termasuk pemanfaatan grup WhatsApp. Pesan disampaikan menggunakan teknik integrasi, ganjaran, dan tataan, sementara perubahan yang muncul pada warga terlihat pada aspek kognitif, afektif, dan konatif. Temuan lain menunjukkan adanya hambatan berupa perbedaan pikiran dan perasaan warga, tujuan yang tidak sama dalam mediasi, serta keterbatasan keterbukaan selama proses komunikasi persuasif berlangsung.

3. Penelitian oleh Nia Ramadhani, Siti Fatimatus Syarifah, Gesha Ayu Hanafiah, Ulfa Malikatz Zahroh, dan Mu'alimin yang dipublikasikan pada tahun 2024 berjudul "Strategi Komunikasi Persuasif dalam Menangani Konflik Bullying di Pesantren: Sebuah Kajian Literatur" dalam *JIM: Journal of International Management* membahas konflik bullying di lingkungan pesantren melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur. Studi ini menguraikan bahwa bullying dipicu oleh faktor internal seperti kepribadian dan pola asuh keluarga serta faktor eksternal berupa budaya pesantren, senioritas, dan keterbatasan pengawasan orang tua. Analisis literatur menunjukkan bahwa penggunaan komunikasi persuasif oleh pendidik dan pengelola pesantren berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku santri, pengelolaan konflik secara dialogis, serta penciptaan suasana pendidikan yang lebih kondusif, sehingga pendekatan ini diposisikan sebagai salah satu alternatif dalam penanganan konflik bullying di pesantren.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran yang luas mengenai penerapan komunikasi persuasif dalam berbagai konteks penyelesaian konflik, mulai dari konflik sosial di tingkat nagari dan RT, konflik di lingkungan pendidikan (pesantren). Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi komunikasi persuasif oleh aparat kecamatan dalam menyelesaikan sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan skala besar di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas.

Kerangka Berpikir



Gambar 2. Bagan Kerangka berpikir tahapan Implementasi komunikasi Persuasif Aparat kecamatan manuhing dalam kasus sengketa lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Kecamatan Manuhing Kalimantan Tengah

Permasalahan antara warga masyarakat dan PT. Kalimantan Hamparan Sawit berawal dari perbedaan dasar penguasaan dan pemahaman terhadap lahan yang diklaim oleh masing-masing pihak. Masyarakat Desa Tumbang Jalemu memahami bahwa lahan yang disengketakan merupakan wilayah yang telah mereka kelola secara turun-temurun, meskipun tidak memiliki pencatatan administratif yang formal. Di sisi lain, perusahaan hadir dengan dasar perizinan dan dokumen hukum yang dianggap sah menurut aturan negara. Kondisi ini menimbulkan benturan persepsi sejak awal interaksi.

PT Kalimantan Hamparan Sawit (KHS) mulai mendapat perhatian pada 8 Juni 2024 setelah Permata Group menerima laporan dari Mighty Earth yang menuding adanya kegiatan pembukaan lahan. Walaupun Permata Group tidak memiliki hubungan bisnis langsung dengan KHS,

komunikasi dilakukan melalui PT Sumber Tani Agung sebagai pembeli hasil panen KHS dan PT Abdi Budi Mulia sebagai perusahaan yang terafiliasi. Dari hasil komunikasi pada Juni 2024, pihak perusahaan menjelaskan bahwa pembukaan lahan dilakukan untuk memenuhi kewajiban kebun plasma yang diminta oleh masyarakat dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Perusahaan juga menyampaikan bahwa lokasi pembukaan lahan tidak berada di kawasan bernilai konservasi tinggi karena telah dilakukan kajian sejak tahun 2020. Menindaklanjuti komitmen lingkungan berupa prinsip tanpa deforestasi, tanpa lahan gambut, dan tanpa eksploitasi, Permata Group meminta agar seluruh kegiatan pembukaan lahan dihentikan sementara dan dilakukan kajian ulang terhadap kondisi lingkungan. Sebagai tindak lanjut, PT KHS menghentikan seluruh kegiatan pembukaan lahan sejak 22 Juli 2024 dan menyetujui pelaksanaan kajian lingkungan oleh pihak independen sebelum melanjutkan kegiatan, dengan proses pemantauan yang terus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang telah disepakati.

Sebagaimana disampaikan oleh Mido selaku perwakilan warga, “Kami memahami sengketa ini muncul karena batas-batas wilayah dan sejarah penguasaan lahan yang sejak awal tidak terdokumentasi. Masyarakat punya dasar pengelolaan turun-temurun yang tidak tercatat secara resmi, sedangkan perusahaan datang dengan dasar perizinan dan dokumen yang lengkap.” Perbedaan dasar ini menjadi akar konflik yang terus berkembang dalam proses dialog.

Permasalahan semakin terasa ketika warga menilai bahwa perusahaan belum sepenuhnya memenuhi janji terkait pengelolaan lahan dan kompensasi yang adil. Dalam berbagai pertemuan, masyarakat merasa bahwa pendekatan awal perusahaan lebih banyak berfokus pada aspek administratif dan legalitas, sementara pengalaman sosial dan sejarah lokal kurang mendapatkan ruang yang memadai. Menurut Andris Sosilo, pada fase awal dialog, “perusahaan, meski belakangan sedikit terbuka, di awal-awal sering terkesan terlalu formal dan lebih fokus pada dokumen. Itu membuat warga merasa kurang didengar.” Situasi ini membuat masyarakat memandang bahwa komunikasi yang dibangun belum menyentuh kebutuhan pemahaman dan empati yang mereka harapkan.

Dalam proses penyampaian aspirasi, masyarakat sebenarnya diberikan kesempatan untuk berbicara dalam forum-forum resmi. Akan tetapi, keterbatasan warga dalam menyusun argumen secara sistematis sering kali membuat pembahasan berjalan melebar dan suasana pertemuan menjadi tegang. Informan menyatakan bahwa “kesempatan berbicara sebenarnya ada, tetapi banyak warga belum bisa menyampaikan masalah secara singkat dan jelas. Akibatnya, pembahasan sering melebar dan membuat suasana pertemuan menjadi tegang.” Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada keberadaan forum dialog, tetapi juga pada kesiapan komunikasi kedua belah pihak dalam mengelola perbedaan pandangan.

Di tengah dinamika tersebut, aparat Kecamatan Manuhing dipandang masyarakat memiliki pendekatan komunikasi yang relatif lebih dapat diterima. Warga menilai bahwa aparat kecamatan menggunakan bahasa yang lebih menenangkan dan berupaya menjaga posisi netral dalam setiap pertemuan. Menurut Andris Sosilo, “kalau kecamatan datang, biasanya bahasanya lebih menenangkan dan terasa netral. Pendekatan mereka cenderung mendengar dulu sebelum menanggapi.” Gaya komunikasi seperti ini membantu menciptakan ruang dialog yang lebih terkendali, terutama ketika emosi masyarakat mulai meningkat akibat ketidakpastian penyelesaian sengketa. Dalam aspek penyampaian informasi, masyarakat menganggap cara aparat kecamatan dalam menyampaikan persoalan lebih mudah dipahami dibandingkan perusahaan.

Ketika fakta dan langkah penyelesaian disampaikan secara sederhana serta disertai sikap empatik, suasana dialog dinilai lebih kondusif. Informan menyebutkan bahwa “yang paling efektif itu ketika perusahaan atau kecamatan menjelaskan fakta dan langkah penyelesaian secara

sederhana, tanpa nada menggurui.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pilihan bahasa dan sikap komunikator menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meredakan ketegangan di lapangan.

Meski terdapat upaya komunikasi dari berbagai pihak, masyarakat masih merasakan adanya ketidakseimbangan dalam percakapan, terutama ketika pembahasan beralih pada aspek legalitas. Dalam beberapa pertemuan, argumentasi perusahaan terkait dokumen hukum dianggap lebih dominan, sementara penjelasan warga mengenai sejarah penguasaan lahan hanya dipandang sebagai klaim sepihak. Andris Sosilo mengungkapkan, “pernah ada situasi di mana pembahasan lebih banyak mengarah ke argumentasi tentang legalitas. Di sisi lain, penjelasan masyarakat tentang sejarah penguasaan lahan hanya dianggap klaim”. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa posisi mereka belum sepenuhnya dipahami dalam proses dialog.

Secara keseluruhan, masyarakat menilai bahwa upaya komunikasi yang dilakukan aparat Kecamatan Manuhing memberikan dampak positif dalam menjaga suasana dialog tetap terkendali, meskipun persoalan substantif sengketa belum sepenuhnya terselesaikan. Warga menghargai sikap aparat kecamatan yang tidak memberikan janji di luar kewenangan serta berusaha menjaga keseimbangan ruang bicara. Sebagaimana disampaikan informan, “kecamatan dinilai cukup adil. Mereka menjaga suasana tetap kondusif dan memberi ruang bicara yang seimbang.” Penilaian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat, komunikasi yang dijalankan aparat kecamatan memiliki kontribusi dalam meredakan konflik, meskipun tantangan perbedaan data dan cara pandang dengan perusahaan masih terus berlangsung.

PT. Kalimantan Hamparan Sawit (KHS)

Dari sudut pandang PT. Kalimantan Hamparan Sawit, sengketa lahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Manuhing dipahami sebagai persoalan yang bersumber dari ketidaksinkronan data antara dokumen legal perusahaan dan klaim historis masyarakat. Perusahaan menyatakan bahwa seluruh aktivitas operasional didasarkan pada izin resmi, peta Hak Guna Usaha, serta hasil verifikasi lapangan yang dilakukan secara bertahap. Menurut Hendra Wijaya, “perusahaan mengidentifikasi akar sengketa melalui audit dokumen legal, pengecekan peta HGU, dan verifikasi lapangan. Biasanya persoalan muncul akibat ketidaksinkronan data batas, klaim historis yang tidak terdokumentasi, serta perbedaan interpretasi penggunaan lahan.” Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa perusahaan memandang sengketa sebagai perbedaan dasar data dan cara pandang, bukan semata konflik kepentingan.

Dalam menghadapi situasi sengketa, PT. KHS menyusun pendekatan komunikasi awal dengan menempatkan pengumpulan informasi sebagai langkah pertama sebelum melakukan dialog terbuka. Perusahaan berusaha memahami keluhan masyarakat sekaligus menjelaskan posisi yang mereka miliki berdasarkan dokumen dan regulasi. Informan menjelaskan bahwa “kami memulai dengan pengumpulan informasi terlebih dahulu, lalu menjelaskan posisi perusahaan, mendengarkan keluhan masyarakat dan menegaskan komitmen kami untuk mencari solusi penyelesaian yang terbaik untuk kepentingan bersama.” Pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya membangun dialog secara bertahap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman sejak awal pertemuan. Dalam proses penyampaian pesan, perusahaan menyadari potensi salah tafsir yang dapat muncul apabila bahasa yang digunakan terlalu teknis. Untuk menghindari hal tersebut, PT. KHS menyatakan bahwa mereka berusaha menyederhanakan penjelasan tanpa menghilangkan substansi informasi. Hendra Wijaya menyampaikan, “kami fokus pada fakta, dokumen legal, dan kronologi. Untuk setiap poin, kami berusaha menggunakan bahasa yang jelas dan ringan, serta menghindari istilah teknis yang dapat disalahartikan.” Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami posisi perusahaan dengan lebih utuh dan dialog tidak terjebak pada perdebatan istilah hukum yang sulit dipahami.

Perusahaan juga menyadari bahwa karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat memengaruhi penerimaan pesan. Dalam beberapa situasi, PT. KHS melibatkan staf lokal yang lebih dekat dengan masyarakat agar komunikasi berjalan lebih lancar. Menurut informan, “kami menyesuaikan bahasa. Jika diperlukan, kami melibatkan staf lokal yang lebih dekat dengan budaya masyarakat agar penyampaian lebih mudah dipahami.” Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian gaya komunikasi agar dialog tidak terasa berjarak dan tetap berada dalam suasana yang kondusif.

Dalam kaitannya dengan upaya aparat Kecamatan Manuhing, PT. KHS menilai keterlibatan kecamatan membantu menjaga alur komunikasi agar tetap terarah. Perusahaan menyatakan bahwa koordinasi dengan aparat kecamatan dilakukan untuk memastikan proses dialog berjalan sesuai regulasi serta memanfaatkan posisi kecamatan sebagai mediator yang dipercaya masyarakat. Hendra Wijaya menjelaskan, “kami koordinasi dengan kecamatan untuk memastikan proses berjalan sesuai regulasi dan untuk memanfaatkan kapasitas mereka dalam meredam ketegangan.” Kehadiran aparat kecamatan dinilai membantu perusahaan dalam menyampaikan pesan secara lebih diterima oleh masyarakat.

Ketika menghadapi keberatan dari warga, PT. KHS mengklaim berusaha menghindari respons yang bersifat defensif. Perusahaan memilih memberikan klarifikasi berbasis data serta menawarkan tindak lanjut sebagai bentuk keterbukaan dialog. Informan menyatakan, “kami merespons keberatan dengan klarifikasi berbasis data, bukan penolakan spontan, dan menawarkan opsi tindak lanjut agar masyarakat merasa diperhatikan.” Pendekatan ini dipandang perusahaan sebagai cara untuk menjaga dialog tetap berjalan tanpa memperbesar permasalahan yang sudah ada.

Secara keseluruhan, PT. Kalimantan Hampan Sawit memandang bahwa komunikasi yang dilakukan bersama aparat Kecamatan Manuhing telah membantu menciptakan ruang dialog yang lebih terkelola, meskipun proses penyelesaian sengketa masih memerlukan waktu. Perusahaan menilai bahwa konsistensi pesan, transparansi informasi, serta koordinasi dengan pemerintah lokal menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman bersama. Hendra Wijaya menyampaikan bahwa “keberhasilan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat, konsistensi sikap perusahaan, transparansi data, serta kualitas hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan lokal.” Pandangan ini menunjukkan bahwa dari sisi perusahaan, komunikasi dipahami sebagai proses jangka panjang yang harus dijalani secara berkelanjutan bersama masyarakat dan aparat kecamatan.

Implementasi Komunikasi Persuasif oleh Aparat Kecamatan Manuhing dalam Kasus Sengketa Lahan di PT. Kalimantan Hampan Sawit

Aparat Kecamatan Manuhing memaknai komunikasi persuasif sebagai proses mengajak kedua belah pihak untuk melihat persoalan secara objektif tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dalam pandangan kecamatan, komunikasi persuasif tidak diarahkan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan untuk membuka ruang dialog yang memungkinkan tercapainya pemahaman bersama. Bambang Hari Mulyanto selaku Camat Manuhing menjelaskan bahwa “kami memaknai komunikasi persuasif sebagai upaya mengajak kedua pihak melihat persoalan secara objektif, tanpa paksaan, namun dengan argumentasi yang jelas dan solusi yang memungkinkan diterima bersama.” Pemaknaan ini menjadi dasar sikap kecamatan dalam menjalankan fungsi mediasi sejak awal konflik muncul.

Ketika menerima informasi adanya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, langkah awal yang dilakukan aparat kecamatan adalah melakukan verifikasi informasi secara menyeluruh. Kecamatan tidak langsung mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi

terlebih dahulu menggali keterangan melalui perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak perusahaan untuk memahami duduk persoalan secara utuh. Informan menyampaikan, “biasanya kami memverifikasi informasi terlebih dulu melalui perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perusahaan untuk memahami duduk persoalan sebelum menentukan langkah lanjutan.” Tahapan ini dilakukan agar proses komunikasi selanjutnya tidak dibangun di atas asumsi yang keliru.

Dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, aparat Kecamatan Manuhing memilih pendekatan yang bersifat informal sebelum memasuki tahap mediasi resmi. Aparat kecamatan turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan warga, dan menunjukkan kehadiran pemerintah sebagai penengah yang berusaha menjaga keseimbangan. Bambang Hari Mulyanto menyampaikan bahwa “kami turun langsung, mendengar keluhan masyarakat secara informal, dan menunjukkan bahwa kecamatan hadir sebagai penengah, bukan pembela salah satu pihak.” Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun rasa aman sehingga masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan pandangannya.

Di sisi lain, kecamatan juga membangun komunikasi dengan pihak perusahaan melalui dialog awal yang bersifat persuasif. Aparat kecamatan mengingatkan perusahaan mengenai kewajiban hukum dan etika komunikasi, sekaligus mengajak perusahaan untuk bersikap terbuka dalam proses dialog dengan masyarakat. Informan menjelaskan, “kami membuka dialog awal dengan manajemen perusahaan untuk memastikan mereka memahami kewajiban hukum dan etika komunikasi, serta pentingnya keterbukaan dalam proses mediasi.” Langkah ini dilakukan agar perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial yang berkembang.

Saat proses pertemuan berlangsung, aparat kecamatan menggunakan berbagai teknik komunikasi untuk menjaga suasana dialog tetap terkendali. Teknik mendengarkan aktif digunakan dengan cara merangkul kembali pernyataan pihak yang berbicara agar tidak terjadi salah tafsir. Ketika ketegangan meningkat, diskusi diarahkan kembali pada prosedur atau fakta hukum guna menurunkan emosi. Bambang Hari Mulyanto menyampaikan, “kami menggunakan teknik active listening, merangkul ulang pernyataan pihak yang sedang berbicara, dan jika suasana mulai panas, kami tarik ke prosedur atau fakta hukum.” Teknik ini membantu menjaga alur diskusi agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Untuk menjaga keseimbangan komunikasi, kecamatan mengatur alur diskusi dengan memberikan giliran bicara yang setara bagi kedua pihak. Aparat kecamatan bertindak sebagai moderator yang memastikan tidak ada pihak yang mendominasi percakapan. Informan menegaskan bahwa “kami membuat giliran bicara, memastikan setiap pihak memiliki waktu setara, dan tidak ada keputusan yang dibuat jika salah satu pihak belum menyampaikan pandangannya.” Pengaturan ini bertujuan agar semua pihak merasa dihargai dan didengar selama proses dialog berlangsung.

Secara berkelanjutan, aparat Kecamatan Manuhing juga melakukan evaluasi terhadap cara komunikasi yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan dengan meninjau bagian-bagian dialog yang berjalan lancar maupun yang memicu ketegangan, sehingga dapat menjadi pembelajaran untuk penanganan konflik berikutnya. Bambang Hari Mulyanto menyampaikan, “kami meninjau kembali proses: bagian mana yang berjalan baik, mana yang memicu ketegangan, dan mana yang perlu diperbaiki.” Upaya ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dipandang sebagai proses dinamis yang terus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan karakter para pihak yang terlibat.

Secara sederhana, Langkah-langkah yang dilakukan Aparat Kecamatan Manuhing adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan proses Implementasi Komunikasi Persuasif Aparat Kecamatan Manuhing.

Tahap Proses	Bentuk Implementasi Komunikasi Persuasif	Penjelasan Singkat
Pemaknaan Awal Komunikasi Persuasif	Ajakan dialog tanpa tekanan	Komunikasi dipahami sebagai upaya membuka dialog objektif tanpa memihak.
Verifikasi Informasi Awal	Pengumpulan data awal konflik	Informasi dikumpulkan dari desa, tokoh masyarakat, dan perusahaan.
Pendekatan Informal kepada Masyarakat	Mendengarkan langsung keluhan warga	Aparat hadir di lapangan untuk membangun keterbukaan dan rasa aman.
Dialog Awal dengan Pihak Perusahaan	Pengingat kewajiban hukum dan etika	Perusahaan diajak berdialog dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial.
Pengelolaan Dialog Mediasi	Teknik komunikasi dialogis	Aparat menerapkan mendengarkan aktif dan pengendalian emosi diskusi.
Pengaturan Alur Komunikasi	Giliran bicara setara	Semua pihak diberi kesempatan bicara tanpa dominasi.
Evaluasi Proses Komunikasi	Refleksi proses komunikasi	Proses komunikasi ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Adapun, kesesuaian antara implementasi komunikasi persuasif oleh Aparat Kecamatan Manuhing dengan tahapan proses komunikasi persuasif dalam penyelesaian konflik dua pihak adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kesesuaian Tahapan proses Komunikasi Persuasif dalam konflik dua pihak dengan komunikasi persuasif aparat kecamatan manuhing.

Tahap Proses	Implementasi oleh Aparat Kecamatan Manuhing	Penjelasan Analitis Singkat
Identifikasi Konflik	Verifikasi informasi melalui desa, tokoh masyarakat, dan perusahaan	Membantu memahami akar konflik sebelum dialog langsung.
Pembangunan Kepercayaan	Pendekatan informal dan mendengarkan keluhan warga	Mendorong rasa aman dan kesiapan berdialog.
Penyampaian Pesan Persuasif	Dialog awal dengan perusahaan terkait kewajiban hukum	Pesan disampaikan secara persuasif tanpa tekanan.
Dialog dan Pertukaran Pandangan	Pengaturan giliran bicara dan mendengarkan aktif	Menjaga keseimbangan dan mengurangi ketegangan.
Negosiasi dan Musyawarah	Pengarahan diskusi pada fakta dan prosedur	Menjaga diskusi tetap rasional dan terarah.
Penguatan Kesepakatan	Keputusan diambil setelah semua pihak berbicara	Kesepakatan didasarkan pada persetujuan bersama.
Tindak Lanjut dan Evaluasi	Evaluasi proses dialog dan dinamika komunikasi	Komunikasi dipahami sebagai proses yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi komunikasi persuasif oleh Aparat Kecamatan Manuhing dalam kasus sengketa lahan di PT. Kalimantan Hampan Sawit dijalankan melalui tahapan yang sistematis dan selaras dengan proses komunikasi persuasif dalam penyelesaian konflik dua pihak. Aparat kecamatan memulai dengan pemaknaan komunikasi sebagai ajakan dialog tanpa paksaan, dilanjutkan dengan verifikasi informasi untuk memahami akar konflik secara menyeluruh. Pendekatan informal kepada masyarakat dan dialog awal dengan perusahaan menunjukkan upaya membangun kepercayaan serta mendorong keterbukaan kedua pihak.

Dalam proses mediasi, penggunaan teknik mendengarkan aktif, pengaturan giliran bicara, dan pengalihan diskusi pada fakta hukum berfungsi menjaga keseimbangan serta mengendalikan ketegangan. Selanjutnya, keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan menunggu seluruh pandangan disampaikan, sehingga kesepakatan yang dihasilkan didasarkan pada kesepahaman bersama. Evaluasi berkelanjutan terhadap proses komunikasi menegaskan bahwa komunikasi persuasif dipahami sebagai proses yang dinamis dan adaptif terhadap kondisi lapangan, sekaligus menjadi modal pembelajaran untuk penanganan konflik serupa di masa mendatang.

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan, komunikasi persuasif merupakan pendekatan penting dalam penyelesaian konflik, terutama yang melibatkan kepentingan yang saling bertentangan. Komunikasi persuasif dirancang untuk membuka ruang dialog, perundingan, dan musyawarah agar tercapai kesepakatan bersama tanpa paksaan, dengan memperhatikan aspek rasional, emosional, dan kredibilitas komunikator. Dalam hal ini, aparat pemerintah, seperti camat, berperan sebagai mediator yang mengelola komunikasi dengan baik, menggunakan strategi komunikasi yang tepat, termasuk komunikasi persuasif.

Dalam konteks komunikasi pemerintahan, aparat Kecamatan Manuhing berhasil mengimplementasikan pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip komunikasi pemerintahan dalam penyelesaian konflik. Komunikasi pemerintahan bertujuan untuk membangun pemahaman, partisipasi, dan akuntabilitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam kasus sengketa lahan antara masyarakat Desa Tumbang Jalemu dan PT Kalimantan Hampan Sawit, aparat kecamatan memfasilitasi dialog antara kedua pihak dengan membuka ruang komunikasi yang memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka secara terbuka. Proses ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan pengaturan alur komunikasi yang setara, sehingga semua pihak merasa dihargai dalam percakapan.

Terkait dengan keberhasilan komunikasi persuasif dalam penyelesaian konflik, aparat Kecamatan Manuhing telah mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan teori komunikasi persuasif. Penggunaan pertemuan tatap muka dan platform online memberikan akses informasi yang lebih luas, memastikan bahwa setiap pihak tetap mendapatkan informasi terkini, meskipun tidak hadir secara fisik. Ini mendorong partisipasi aktif dan menjaga solidaritas antar pihak yang terlibat. Selain itu, aparat kecamatan juga melakukan pendekatan informal dengan masyarakat, yang memungkinkan terciptanya rasa aman dan keterbukaan dari kedua belah pihak. Dengan cara ini, masyarakat merasa lebih nyaman untuk menyampaikan keluhan dan pandangan mereka.

Selain itu, dalam proses mediasi, aparat kecamatan menggunakan teknik mendengarkan aktif dan pengaturan giliran bicara yang setara, yang membantu menjaga agar diskusi tetap terkendali. Hal ini terbukti efektif dalam mengelola ketegangan dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Komunikasi yang dilakukan aparat kecamatan juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi, karena mereka menggunakan pendekatan yang fleksibel, baik melalui komunikasi formal maupun informal, tergantung pada situasi yang dihadapi.

Meskipun demikian, beberapa aspek masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal kejelasan

dan keterbukaan pesan yang lebih menyeluruh. Masyarakat masih merasakan bahwa penjelasan terkait sejarah penguasaan lahan mereka belum cukup diperhatikan dalam diskusi, yang menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam menyeimbangkan informasi yang diberikan. Dalam hal ini, keberhasilan komunikasi persuasif yang dilakukan aparat kecamatan dapat dinilai **cukup berhasil**, karena masih ada tantangan dalam menyelesaikan substansi sengketa lahan secara tuntas.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Komunikasi Persuasif

Meskipun aparat Kecamatan Manuhing telah melaksanakan upaya yang maksimal, implementasi komunikasi persuasif menghadapi tantangan dan kendala seperti perbedaan fundamental persepsi dan data mengenai penguasaan lahan. Masyarakat bersandar pada klaim historis dan penguasaan turun-temurun yang seringkali tidak terdokumentasi secara formal, sedangkan perusahaan beroperasi berdasarkan dokumen legal yang kuat, seperti izin usaha dan peta HGU. Perbedaan mendasar ini menciptakan persepsi yang berbeda mengenai kepemilikan lahan, sehingga sulit untuk mencapai titik temu yang substansial.

Kendala lain yang dihadapi adalah ketidakseimbangan kekuatan komunikasi yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam forum diskusi, argumentasi pihak perusahaan yang didukung oleh data legal yang rinci dan terstruktur cenderung lebih diakui dibandingkan penjelasan masyarakat yang lebih bersifat naratif dan berbasis pengalaman personal, ditambah keterbatasan masyarakat dalam menyusun argumen yang baik dan mengartikulasikan pandangan mereka dalam bahasa yang diterima secara legal-administratif. Akibatnya, diskusi seringkali terasa melebar dan memicu ketegangan karena perbedaan cara pandang dan argumentasi.

Kompleksitas isu agraria, yang melibatkan aspek hukum yang rumit, sejarah panjang penguasaan lahan, serta dimensi ekonomi yang signifikan, menjadi tantangan tersendiri. Meskipun efektif dalam mengelola eskalasi konflik, cenderung lebih berperan dalam mengelola dinamika konflik dan menjaga stabilitas sosial daripada menyelesaikan substansi sengketa lahan secara tuntas. Komunikasi persuasif di sini berfungsi lebih sebagai alat fasilitasi dialog, peredaman emosi, dan penjaga agar proses mediasi tidak terhenti, yang merupakan fondasi penting untuk mencapai penyelesaian yang lebih substantif di masa depan.

Dampak Komunikasi Persuasif Aparat Kecamatan Manuhing

Dampak komunikasi persuasif yang dilakukan oleh aparat Kecamatan Manuhing dalam sengketa lahan PT. Kalimantan Hamparan Sawit terlihat jelas dalam upaya meredakan ketegangan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa meskipun sengketa lahan belum sepenuhnya terselesaikan, komunikasi yang dilakukan oleh aparat kecamatan membantu menjaga suasana dialog tetap kondusif. Aparat kecamatan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dan menenangkan, serta berusaha menjaga keseimbangan dalam setiap pertemuan, memberikan kesempatan berbicara yang setara kepada semua pihak. Hal ini memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka secara terbuka tanpa merasa tertekan.

Selanjutnya, teknik komunikasi seperti mendengarkan aktif dan pengaturan giliran bicara yang setara berperan dalam menjaga agar diskusi tetap terkendali. Keberhasilan ini penting karena tidak hanya mengurangi ketegangan, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka antara kedua belah pihak. Masyarakat menganggap bahwa komunikasi yang diterapkan aparat kecamatan memberikan kesempatan untuk memahami pandangan perusahaan secara lebih jelas, sehingga memperbaiki suasana yang semula tegang menjadi lebih konstruktif. Meskipun demikian, masyarakat juga merasa bahwa penjelasan terkait sejarah penguasaan lahan mereka masih belum cukup dihargai dalam forum-forum dialog tersebut, yang menunjukkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan kesetaraan dalam komunikasi yang lebih mendalam.

Di sisi lain, meskipun proses komunikasi yang dilakukan aparat kecamatan mampu menjaga kestabilan sosial dan meredakan eskalasi konflik, substansi sengketa lahan masih belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi persuasif yang dilakukan lebih banyak berfungsi sebagai alat untuk menjaga proses dialog tetap berjalan, bukan sebagai solusi langsung terhadap permasalahan pokok. Konflik yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang kompleks memerlukan waktu lebih lama untuk penyelesaian substansial, namun upaya komunikasi yang berkelanjutan tetap menjadi landasan penting untuk mencapai solusi yang lebih adil di masa depan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Implementasi komunikasi persuasif oleh aparat Kecamatan Manuhing dalam sengketa lahan PT Kalimantan Hampan Sawit menunjukkan keberhasilan dalam meredakan ketegangan sosial dan menjaga stabilitas komunikasi antara masyarakat dan perusahaan. Meskipun komunikasi yang dilakukan efektif dalam menjaga suasana tetap terkendali, permasalahan substantif terkait kepemilikan lahan dan klaim legalitas masih belum sepenuhnya terselesaikan. Secara keseluruhan, implementasi komunikasi persuasif oleh aparat Kecamatan Manuhing dalam kasus ini dapat dinilai **cukup berhasil**. Keberhasilan tersebut tercermin dalam penggunaan pendekatan yang bijaksana, dengan teknik seperti mendengarkan aktif dan pengaturan giliran bicara yang setara, yang memungkinkan kedua belah pihak merasa dihargai dan didengar. Proses komunikasi yang dilakukan tidak hanya berfungsi untuk mengelola ketegangan, tetapi juga sebagai jembatan untuk mencapai pemahaman bersama dalam penyelesaian konflik.

Saran

Diharapkan bahwa aparat Kecamatan Manuhing terus mengembangkan metode komunikasi persuasif yang lebih mendalam, terutama dalam hal penyampaian informasi yang lebih jelas dan terbuka mengenai sejarah penguasaan lahan. Penting bagi aparat untuk mengintegrasikan lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka, termasuk dalam bentuk dokumentasi yang lebih lengkap terkait klaim historis masyarakat. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam menyusun argumen yang lebih terstruktur juga perlu dipertimbangkan agar forum diskusi lebih produktif dan tidak terjebak pada perdebatan yang tidak membuahkan hasil.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, Willya. "Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian di Indonesia." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (2024): 8–18. ISSN 2655-8823 (print), ISSN 2656-1786 (online) <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53280>
- Afrihadi, Aldi, Syarief Makhya, Feni Rosalia, and Maulana Mukhlis. 2025. "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik Berbasis Komunitas Terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam". *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10 (2):206-19. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4930>.
- Agustina, Wita, I Dewa Ketut Kerta Widana, dan Christine S. Marnani. "Tantangan dan Peluang Komunikasi Persuasif dalam Membangun Kepercayaan Publik dan Mendukung Proses Rekonstruksi Pasca Bencana." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (Juni 2024): 410–417. P-ISSN 1978-0184, E-ISSN 2723-2328
- Cangara, H. (2019). *Komunikasi Persuasif: Teori dan Aplikasi* (Edisi Revisi). PT Raja Grafindo Persada. <https://scholar.google.com/scholar?q=Komunikasi+Persuasif+Teori+dan+Aplikasi+Hafied+Cangara+2019>

- Dinas Kominfosantik Kab. Gumas. 2021. Tuntut Realisasi Kebun Plasma, Masyarakat Datangi PT Kalimantan Hamparan Sawit diakses dari <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/36039/tuntut-realisasi-kebun-plasma-masyarakat-datangi-pt-kalimantan-hamparan-sawit> pada 22 Desember 2025
- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas. Profil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024. Kuala Kurun: Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, 2024.
- Hakim, et. al. 2023. Komunikasi Bisnis: Informatif, Persuasif, Kolaboratif & Integratif di Era Digital. Penerbit Adab. Indramayu. Hlm. 55
- Heluka, Y., Erniwati, & Halim, A. (2023). Strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik di organisasi pelajar mahasiswa Yahukimo Papua di Kota Makassar. CORE: Journal of Communication Research, 1(2), 47-56.
- Hidayat, Rahmat, and Susi Evanita. 2022. "Strategi Komunikasi Pemerintah Nagari Dalam Menangani Konflik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Antar Warga Di Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar". Jurnal Pendidikan Tambusai 6 (2):12322-30. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4421>.
- Kaltengonline.com "Hak Warga Terabaikan, Picu Konflik perkebunan". Diakses dari <https://kaltengonline.com/2023/09/14/hak-warga-terabaikan-picu-konflik-perkebunan/>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016. Hlm. 2
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Demers, J. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory* (Vol. 1-2). SAGE Publications. <https://scholar.google.com/scholar?q=Encyclopedia+of+Communication+Theory+Littlejohn+Foss+Demers+2009>
- Madi, Stevi Gretlin, Lukas Lebi Daga, dan I Gusti Ayu Rina Pietriani. 2023. "Komunikasi Persuasif Ketua RT Dalam Mengatasi Hubungan Disharmonisasi Warga : (Studi Kasus Di RT028, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang)". Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi 2 (1):32-46. <https://doi.org/10.59895/deliberatio.v2i1.28>.
- Mislianti, Mislianti et al. Strategi Komunikasi Komunitas Rumah Bekerah dalam Memberikan Ruang Bercecerita bagi Perempuan di Kota Samarinda. Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA, [S.l.], v. 17, n. 02, p. 31-43, july 2025. ISSN 2354-8193.
- Musawir, et. al. 2026. Komunikasi Persuasif Pendekatan dan Strategi. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Kab. Agm. Hlm. 45
- Nabilla, Cindy, M. Qur'anul Kariem, and Doris Febrianti. 2022. "Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit". Journal of Urban Sociology 5 (2):100-108. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2462>.
- Nasichah, Hilyatul Ilmi, dan Azka Nidaulhaq. 2024. "Peran Komunikasi Nonverbal dalam Pendekatan Parenting Aisah Dahlan di YouTube draisahdahlan dengan Judul Love Language for Gen Alpha." Makalah akademik, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nurdiantara, Robby Rachman, dan Sitti Maesurah. "Pengalaman Komunikasi Interpersonal Mahasiswi dan Persepsinya terhadap Kredibilitas Dosen di Kampus Berbasis Islam: Studi pada Program Studi Komunikasi Universitas Halim Sanusi." An Nisa' 18, no. 2 (Desember 2025): 16-36

-
- Nurjanah. (2015). Peran komunikasi persuasif dalam penyelesaian konflik antara nelayan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 113-190.
- Ramadhani, Nia, Siti Fatimatus Syarifah, Gesha Ayu Hanafiah, Ulfa Malikatuz Zahroh, and Mu'alimin Mu'alimin. 2024. "Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Menangani Konflik Bullying Di Pesantren: Sebuah Kajian Literatur". *JIM : Journal Of International Management* 3 (2):105-15. <https://doi.org/10.62668/jim.v3i2.1275>.
- Ratu Reva N., Dian Hardianti, Brizita Auliani A, Helena Angelica S, and Aprilia Ningrum. 2025. "Pengaruh Komunikasi Yang Efektif Terhadap Keberhasilan Lobi Dan Negosiasi". *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara* 2 (2):107-14. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i2.244>.
- Riza Gusti Rahayu. 2024. "Strategi Komunikasi Persuasif Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa : (Studi Kasus SD Islam Sinar Cendekia BSD)". *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3 (3):249-58. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v3i3.3047>.
- Roosinda, et.al. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing. Yogyakarta.
- Rusman, Farid. 2025. *Metode-metode Penelitian Komunikasi*. UMM Press. Malang. Hlm. 130
- Situmorang, Frenky, and Irvan Rolyesh Situmorang. 2023. "Education on the Physical Expenditure of Fertilizer Supplies Using the FIFO System at PT Kalimantan Hamparan Sawit". *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat* 3 (2):85-91. <https://doi.org/10.55537/jibm.v3i2.739>.
- Tanahkita.id "PT. Kalimantan Hamparan Sawit VS Warga Desa Mantuhe". Diakses dari <https://tanahkita.id/data/konflik/detil/cTZiS0dCdXVCc1k> pda 22 Desember 2025
- Zafitri, Zulfiana (2020) *Strategi Komunikasi Persuasif Pembina dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren DDI Takkalasi*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Zaka P.G, Naufal, Vidi Julius M, Harfi Ahmad N, Rendy Aditya A.W, Rio Bagus U, and Dewi Puspa. (2024) 2024. "Strategi Penerapan Kalimat Persuasif Dalam Membangun Relasi Bisnis". *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia* 1 (2):11. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jbdi/article/view/2382>.